

# **KLIPPING BERITA MEDIA MASSA**



**Kamis, 3 Januari 2019**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (halaman 8)	Kamis, 3 Januari 2019	Korban Tsunami Dapat Hunian Tetap	<p>Presiden Joko Widodo berjanji akan langsung mendirikan hunian permanen bagi korban tsunami Banten dan Lampung. Hunian tetap rencananya tak akan dibangun di daerah yang sama, melainkan di lokasi yang tidak rawan tsunami. Penataan ruang terutama wilayah di sekitar garis pantai sudah mendesak untuk dilakukan. relokasi tempat tinggal perlu dilakukan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa jika terjadi tsunami lagi.</p> <p>Presiden mengatakan “Kita tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi berbicara 20,30 atau 50 tahun ke depan.” Menteri PUPR memang berencana merelokasi 600 rumah di pesisir pantai. Rumah yang direlokasi berjarak 50 sampai 100 meter dari pantai.</p>
2	Media Indonesia	Kamis, 3 Januari 2019	Rapor Biru untuk Pengelolaan APBN 2018	Penerimaan negara yang melwbihi target ialah buah upaya presiden Joko Widodo membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi.
3	Media Indonesia (halaman 14)	Kamis, 3 Januari 2019	Tol Trans Jawa Gerakkan Ekonomi Lokal	Menteri PUPR menyatakan tersambungny tol trans-jawa dari merak hingga pasuruan seanjang 933 KM telah memperlancar arus mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.
4	Kompas (halaman 1)	Kamis, 3 Januari 2019	Tsunami Selat Sunda: Rekonstruksi Pascabencana mulai Dilaksanakan	Setelah masa tanggap darurat bencana tsunami yang melanda Banten-Lampung dinyatakan selesai, pemerintah segera memulai tahapan rekonstruksi dengan membangun rumah baru bagi penyintas tsunami.
5	Kompas (halaman 15)	Kamis, 3 Januari 2019	Pembangunan Huntara Seret	<p>Pembangunan dan penempatan hunian sementara untuk penyintas gempa bumi , tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah melewati target akhir desember 2018. Kendalanya keterbatasan material bangunan.</p> <p>Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengakui seretnya pembangunan dan penempatan Huntara . “Targetnya skhir desember 2018 akan tetapi ada banyak hambatan yang tidak bisa dihindari” .</p> <p>Ketua satuan tugas Penanggulangan bencana Sulteng Kementerian PUPR (Arie Setiadi Moerwanto) menyatakan, material bangunan menjadi kendala utama. Produksi material bangunan, terutama baja ringan terbatas di tengah banyaknya kebutuhan. Selain di SULTeng, Huntara juga dibangun di NTB untuk penyintas gempa bumi.</p>
6	Bisnis Indonesia (halaman 6)	Kamis, 3 Januari 2019	Dampak gempa dan Tsunami Selat Sunda: Manufaktur Aman, Pariwisata Rawan	Menjelang akhir 2018, Indonesia kembali dilanda duka akibat bencana tsunami yang menimpa beberapa daerah di Provinsi Banten dan Lampung. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau

				<p>diyakini menjadi penyebab munculnya tsunami di kawasan Selat Sunda pada 22 Desember lalu.</p>
7	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Kamis, 3 Januari 2019	Pembangunan Akses ke Destinasi Dikebut	<p>Sejumlah proyek percepatan pembangunan akses kawasan wisata di sebagian daerah telah rampung, dan sebagian lainnya menjadi program prioritas tahun ini. Di antaranya pembangunan jalan 41, 08 km dari Kota Padang ke KSPN Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan Sumbar telah rampung.</p> <p>Bahkan ada pula 40 proyek strategis yang focus pada bidang pariwisata dan infrastruktur di Jawa Barat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kehadiran jalan di Sumbar tersebut bakal mempermudah akses wisatawan untuk mendatangi kawasan Mandeh karena waktu tempuh ke lokasi menjadi lebih singkat.</p> <p>Akses jalan yang baik akan menunjang perekonomian masyarakat di Mandeh, yang terkenal dengan pulau-pulaunya yang eksotis dan wisata baharinya.</p>
8	Bisnis Indonesia (halaman 20)	Kamis, 3 Januari 2019	Jababeka Ingin Bangun Tanggul Laut	<p>PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. mengajak pemerintah untuk membangun tanggul dan pemecah ombak di KEK Tanjung Lesung Banten setelah terjadi tsunami di kawasan itu 22 Desember 2018 lalu. Chairman Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono mengatakan bahwa ajakan tersebut telah disampaikan kepada Menko Perekonomian.</p> <p>Saya sudah sampaikan ke Menko (perekonomian) Darmin Nasution, beliau sudah menyambut dengan baik. "Saya kira akan menunggu perencanaan dari pemerintah."</p> <p>Selain pembangunan tanggul, Darmono menambahkan bahwa perlu juga dibangun <i>shelter</i> untuk tempat perlindungan serta peringatan dini agar orang bisa bersiap ketika terjadi bencana.</p>
9	Bisnis Indonesia (halaman 20)	Kamis, 3 Januari 2019	Proyek Bendungan: Kontrak Rp. 7,18 Triliun Ditandatangani Desember 2018	<p>Menjelang pergantian tahun, Kementerian PUPR menandatangani Sembilan paket kontrak pembangunan lima bendungan senilai Rp. 7, 18 triliun dengan sejumlah BUMN.</p> <p>Berdasarkan data lelang pengadaan secara elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, lelang 9 paket tersebut dimenangkan oleh BUMN.</p> <p>Sembilan paket kontrak tersebut terdiri atas: Bendungan Menikin (2 paket), Bendungan Bagong (2 paket), Bendungan Rukoh (2 paket), Bendungan Meninting (2 paket), dan Bendungan Tamblang (1 paket).</p>
10	Bisnis Indonesia (halaman 20)	Kamis, 3 Januari 2019	Struktur Organisasi PUPR: Pembiayaan Hunian Harus Difokuskan	<p>Asosiasi Bidang Perumahan menilai keputusan pemerintah mengubah struktur organisasi Kementerian PUPR melalui Perpres No. 135 Tahun 2018 tentang Kementerian PUPR perlu dipertimbangkan.</p>

				<p>Salah satu poin dalam perpres tersebut yaitu Ditjen Pembiayaan Perumahan diubah menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR.</p> <p>Perubahan struktur tersebut dikhawatirkan bisa menjadi beban yang terlalu berat bagi ditjen yang baru terbentuk. Ketua Umum DPP Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan bahwa seharusnya perumahan lebih diprioritaskan dan difokuskan. Dia juga mengatakan bahwa masalah perumahan bukanlah hal yang sederhana, melainkan terkait dengan banyak hal seperti sosial, pertanahan, dan perizinan.</p>
--	--	--	--	--

Judul	<b>Korban Tsunami Dapat Hunian Tetap</b>	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Koran Tempo (halaman 8)		
Resume	Presiden Joko Widodo berjanji akan langsung mendirikan hunian permanen bagi korban tsunami Banten dan Lampung. Hunian tetap rencananya tak akan dibangun di daerah yang sama, melainkan di lokasi yang tidak rawan tsunami. Penataan ruang terutama wilayah di sekitar garis pantai sudah mendesak untuk dilakukan. Relokasi tempat tinggal perlu dilakukan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa jika terjadi tsunami lagi. Presiden mengatakan "Kita tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi berbicara 20,30 atau 50 tahun ke depan." Menteri PUPR memang berencana merelokasi 600 rumah di pesisir pantai. Rumah yang direlokasi berjarak 50 sampai 100 meter dari pantai.		

# Korban Tsunami Dapat Hunian Tetap

Sekitar 600 rumah di pesisir pantai Lampung Selatan direlokasi.

Maya Ayu Puspitasari  
maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji akan langsung mendirikan hunian permanen bagi korban tsunami Banten dan Lampung. Rencana itu dilontarkan saat Jokowi meninjau Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, yang menjadi lokasi yang terkena dampak bencana akibat letusan Gunung Anak Krakatau, kemarin. "Tidak ada hunian sementara. Jadi langsung akan dibangun rumah," kata Jokowi.

Hunian tetap rencananya tak akan dibangun di daerah yang sama, melainkan di lokasi yang tidak rawan tsunami. Jokowi menyebutkan ada lahan seluas 2 hektare berjarak 400 meter dari lokasi yang terkena dampak bencana yang bisa digunakan untuk tempat relokasi.

Saat ditemui Jokowi, sejumlah pengungsi yang berasal dari Pulau Sebesi meminta agar permukiman mereka direlokasi ke tempat yang lebih tinggi. Masyarakat pesisir itu sudah tidak berani lagi tinggal di bibir pantai.

Jokowi menyatakan penataan tata ruang, terutama wilayah yang berada di sekitar garis pantai, sudah mendesak untuk dilakukan. Relokasi tempat tinggal perlu dilakukan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa bila terjadi tsunami lagi. "Kita tidak

hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke depan, tidak hanya berbicara 10 tahun ke depan. Tapi berbicara 20, 30, atau 50 tahun ke depan," kata dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono memang berencana merelokasi 600 rumah dari pesisir pantai. Rumah yang direlokasi berjarak 50 sampai 100 meter dari pantai.



**"Kita tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke depan, tidak hanya berbicara 10 tahun ke depan. Tapi berbicara 20, 30, atau 50 tahun ke depan."**

—JOKO WIDODO  
PRESIDEN INDONESIA



Salah satu penyintas tsunami di bekas bangunan rumahnya di Desa Way Muli, Rajabasa, Lampung Selatan, kemarin.

Sementara itu, PT Jababeka Tbk, yang merupakan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Tanjung Lesung, menawarkan lahan milik mereka untuk digunakan sebagai lokasi hunian baru bagi warga yang terkena dampak tsunami di Pandeglang, Banten. Direktur Utama PT Jababeka, Setyono Djuandi Darmono, mengatakan perusahaannya hanya memiliki lahan, tapi tidak mengalokasikan anggaran untuk membangun hunian bagi korban ben-

cana. "Kami ingin kerja sama dengan pemerintah Pandeglang," kata Setyono.

Menurut Setyono, masih banyak area yang belum dibangun oleh Jababeka di KEK Tanjung Lesung. Kawasan ini memiliki luas total 1.500 hektare dan baru 158 hektare yang sudah dibangun. Dari 158 hektare ini, hanya 8 hektare yang mengalami kerusakan.

Longsoran erupsi Gunung Anak Krakatau mengacibatkan tsunami di pesisir Banten dan Lampung pada

Jumat, 22 Desember lalu. Hingga kemarin, tercatat 437 orang meninggal, 10 orang hilang, dan 39.923 jiwa mengungsi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih menghitung kerusakan dan kerugian akibat tsunami tersebut. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hunian sementara menjadi kebutuhan mendesak. Daerah yang paling parah terkena dampak adalah Kabupaten

Pandeglang, Banten. Terdapat 11 ribu pengungsi di sana. Saat ini mereka tinggal di 41 bangunan sekolah.

Menurut Sutopo, banyak warga di Pandeglang yang tinggal di pengungsian bukan karena rumah mereka rusak berat, melainkan karena takut tsunami akan datang lagi. "Karena itu, kebijakan pemerintah Kabupaten Pandeglang, mereka akan dikembalikan ke rumahnya masing-masing," ujar dia.

● VINDY FLORENTIN | ILIAR PEBRIANTO

Judul	Rapor Biru untuk Pengelolaan APBN 2018	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Media Indonesia		
Resume	Penerimaan negara yang melwbihi target ialah buah upaya presiden Joko Widodo membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi.		

### Perekonomian Nasional 2018

- Perekonomian nasional 2018 tetap tumbuh positif di tengah kondisi ketidakpastian global.
  - Perekonomian diperkirakan tumbuh sekitar 5,15%, lebih tinggi daripada pencapaian 2017.
  - Inflasi terkendali pada tingkat yang rendah.
  - Nilai tukar rupiah dapat dijaga pada level rata-rata Rp14.247/US\$.
- Hasil pembangunan menunjukkan terus perbaikan.
  - Tingkat kemiskinan turun ke 9,82%.
  - Tingkat pengangguran turun ke 5,34%.
  - Gini ratio lebih rendah ke tingkat 0,389.
- Realisasi APBN 2018 menunjukkan kinerja yang sangat sehat dan kredibel.
  - Defisit sekitar 1,76% PDB -> lebih kecil daripada target APBN 2,19% PDB.
  - Keseimbangan primer menuju nol (negatif Rp1,8 triliun) -> jauh lebih baik daripada rencana APBN sebesar negatif Rp87,3 triliun.
  - Pendapatan negara sebesar Rp1.942,3 triliun melampaui target APBN (102,5% dari APBN 2018).
  - Belanja negara dapat optimal mencapai 99,2% dari APBN 2018 -> mendukung target-target pembangunan 2018.
  - Pembiayaan anggaran 2018 dapat lebih rendah Rp25,5 triliun daripada target APBN -> sehingga tumbuh negatif dari realisasi 2017.

### Pertumbuhan Ekonomi 2018

Pertumbuhan ekonomi pada 2018 meningkat disertai inflasi yang lebih rendah.

Instrumen	2017		2018	
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi
*Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,2	5,07	5,4	5,15*
*Inflasi (% yoy)	4,3	3,6	3,5	3,13
*Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,2	5,0	5,2	4,95
*Nilai tukar (Rp/US\$)	13.400	13.384	13.400	14.247
*Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barel)	48	51	48	67,5*
*Lifting minyak (ribu barel per hari)	815	804	800	776*
*Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.150	1.142	1.200	1.136*

\*Outlook PDB nominal 2018: Rp14.735,9 triliun estimasi

### Pertumbuhan dan Penerimaan Pajak 2018

- Pertumbuhan pajak nonmigas 13,7% sangat kuat jika dibandingkan dengan 2017 (2,9%).
- PPH nonmigas tumbuh tinggi 15,1% jika dibandingkan dengan 2017 *negative growth* (-5,3%).
- PPN tetap tumbuh kuat.
- Penerimaan pajak (DJP) tumbuh 14,3% -> tertinggi sejak 2012 sebesar 12,5%.
- Penerimaan kepabeanan & cukai tumbuh 6,7% -> tertinggi dari rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 5,9%.

### Pembiayaan Anggaran 2018

Realisasi pembiayaan anggaran 2018 dapat dikurangi Rp25,5 triliun dari target APBN, terutama didukung pengurangan pembiayaan utang sebesar Rp32,5 triliun.

Pembiayaan anggaran (Rp triliun)	2017 LKPP	% terhadap APBNP	2018 APBN	2018 Realisasi Sementara	% terhadap APBN
1. Pembiayaan utang	429,1	93,0	399,2	366,7	91,8
a. Surat berharga negara (neto)	441,8	94,5	414,5	358,4	86,5
b. Pinjaman (neto)	(12,7)	213,5	(15,3)	8,3	(54,0)
2. Pembiayaan investasi	(59,8)	100,0	(65,7)	(61,1)	93,1
3. Pemberian pinjaman	(21,)	55,9	(6,7)	(4,3)	63,5
4. Kewajiban penjaminan	(1,0)	100,0	(1,1)	(1,1)	100,0
5. Pembiayaan lainnya	0,4	119,7	0,2	0,2	100,0
<b>Jumlah</b>	<b>366,6</b>	<b>92,3</b>	<b>325,9</b>	<b>300,4</b>	<b>92,2</b>



Sumber: Kementerian Keuangan RI/Foto:Antara

# Rapor Biru untuk Pengelolaan APBN 2018

*Penerimaan negara yang melebihi target ialah buah dari upaya Presiden Joko Widodo membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi.*

NUR AIVANNI  
aivanni@mediaindonesia.com

**P**EMERINTAH mengakhiri tahun anggaran 2018 dengan catatan yang sangat baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran.

Dari sisi penerimaan negara, Kementerian Keuangan mencatat realisasinya menjangkau Rp1.942,3 triliun, atau 102,5% dari target APBN 2018. Realisasi belanja mencapai hampir 100%, yakni Rp2.200,2 triliun, atau 99,2% dari target APBN.

Dengan pencapaian itu, rapor biru pengelolaan APBN 2018 dapat disematkan ke pemerintah mengingat selama ini masalah penerimaan dan pengelolaan selalu meleset jauh dari target.

Hal positif dari tercapainya pencapaian penerimaan sebesar itu membuat defisit

anggaran hanya mencapai 1,76% dari target APBN sebesar 2,19% sehingga memperbaiki neraca keseimbangan primer dari negatif Rp87,3 triliun menjadi hanya negatif Rp1,8 triliun.

Dengan capaian yang baik itu, pemerintah pun pada akhirnya membatalkan penarikan pembiayaan yang berasal dari utang sebesar Rp25,5 triliun dan menyebabkan pertumbuhan pembiayaan berkurang dari tahun sebelumnya.

"Ini adalah suatu hasil yang sangat baik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan paparan mengenai APBN 2018 di Kemenkeu, kemarin.

Sri Mulyani memaparkan realisasi penerimaan negara meningkat 16,6% jika dibandingkan dengan 2017. Jika dirinci lebih lanjut, jumlah penerimaan negara 2018 terdiri

Untuk pertama kali, belanja negara hampir mencapai 100%, yaitu 99,2%.

atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.521,4 triliun, atau 94% dari target Rp1.618,1 triliun. "Meski di bawah 100%, penerimaan perpajakan kita tumbuhnya sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu," katanya.

Selain itu, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp407,1 triliun, atau 147,8% dari target Rp275,4 triliun.

Untuk sisi belanja, Sri Mulyani mengatakan untuk pertama kali, belanja negara hampir mencapai 100%, yaitu

99,2%. "Sampai 31 Desember 2018, kita sudah belanja Rp2.202,2 triliun, atau 99,2% dari APBN," ujarnya.

### Perlu dipertahankan

Anggota Komisi XI DPR Misbahkhan mengapresiasi pencapaian penerimaan yang disampaikan pemerintah.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sejak mengawali pemerintahannya pada 2014 sudah bertekad mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi, termasuk dengan menggenjot penerimaan negara, meliputi sektor pajak, cukai, kepabeanan, dan hibah.

"Jadi, jika sekarang penerimaan negara melebihi 100% dari yang dipatok dalam APBN 2018, itu adalah buah dari upaya Pak Jokowi membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ini adalah prestasi yang sangat

membanggakan di sektor penerimaan negara," ujar Misbahkhan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah juga mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil dalam mengelola fiskal pada 2018. Ia pun berharap capaian tersebut bisa dipertahankan pemerintah pada tahun ini.

"Pencapaian pemerintah dalam mengelola fiskal 2018 dengan sangat baik di tengah gejolak global harus diapresiasi dan tentunya kita berharap pencapaian ini bisa dipertahankan pada 2019," katanya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Yang menjadi tantangan ke depan ialah keterkaitan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari level 5%. (Ant/E-1)

Judul	<b>Tol Trans Jawa Gerakkan Ekonomi Lokal</b>	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Media Indonesia (halaman 14)		
Resume	Menteri PUPR menyatakan tersambungannya tol trans-jawa dari merak hingga pasuruan sepanjang 933 KM telah memperlancar arus mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.		

## SEKILAS

### Tol Trans-Jawa Gerakkan Ekonomi Lokal

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan tersambungannya Tol Trans-Jawa dari Merak hingga Pasuruan sepanjang 933 kilometer telah memperlancar arus mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Para pemudik mendapatkan manfaat dari berkurangnya waktu tempuh serta biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar kendaraan dan biaya penyusutan suku cadang kendaraan.

Namun, manfaat lain juga dirasakan penduduk setempat di sekitar jalur Trans-Jawa yang membuka usaha di berbagai tempat peristirahatan (*rest area*) Tol Trans-Jawa.

"Pembangunan Tol Trans-Jawa mengakomodasi pengembangan dan pemasaran produk-produk lokal di *rest area* tol. Contohnya *rest area* Km 538 Tol Sragen-Ngawi yang didominasi kuliner lokal seperti soto kwali, lontong opor, soto madura, bakso malang, dan berbagai kopi lokal," ungkap Basuki melalui keterangan resminya, kemarin.

Trans-Jawa, sambungannya, juga membuat kunjungan ke lokasi-lokasi wisata di sekitar jalur Tol Trans-Jawa meningkat sehingga membuat roda perekonomian di daerah kian bergerak cepat. (Pra/E-3)

Judul	<b>Tsunami Selat Sunda: Rekonstruksi Pascabencana mulai Dilaksanakan</b>	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 1)		
Resume	Setelah masa tanggap darurat bencana tsunami yang melanda Banten-Lampung dinyatakan selesai, pemerintah segera memulai tahapan rekonstruksi dengan membangun rumah baru bagi penyintas tsunami.		

## TSUNAMI SELAT SUNDA

# Rekonstruksi Pascabencana Mulai Dilaksanakan

**KALIANDA, KOMPAS** — Setelah masa tanggap darurat bencana tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung dinyatakan selesai, pemerintah segera memulai tahap rekonstruksi dengan membangun rumah baru bagi penyintas tsunami. Pemerintah menargetkan relokasi warga penyintas bencana selesai paling lambat tiga bulan.

Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan ke Rajabasa dan Kalianda, Kabupaten Lam-

pung Selatan, Lampung, Rabu (2/1/2019), mengatakan, tahap evakuasi segera selesai. "Kita akan segera masuk ke tahap rekonstruksi. Apalagi, rakyat sudah meminta dibangun rumah," kata Presiden.

Saat mengunjungi Desa Kunjir dan Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Presiden Jokowi berdialog dengan warga. Mayoritas warga setuju direlokasi dan meminta pemerintah segera membangun rumah baru bagi me-

reka. Hanya sebagian kecil warga menolak relokasi dengan alasan ekonomi.

Pemerintah memutuskan merelokasi warga yang tinggal dekat pantai. Pemerintah juga akan menata ulang tata ruang di area pesisir yang berpotensi terkena tsunami. "Iya, direlokasi, dipindah karena lokasinya rawan tsunami. Kita tidak hanya bicara sekarang, tetapi bicara 20, 30, 40, 50 tahun ke depan, menata ulang tata ruang untuk

mitigasi bencana," kata Presiden.

Di Desa Way Muli dan Kunjir, 490 rumah rusak berat diterjang tsunami pada 22 Desember 2018.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, tersedia 2 hektar lahan di Way Muli untuk relokasi rumah warga. Lahan di dataran tinggi itu hibah dari seorang warga. Pemerintah merancang mem-

bangun permukiman baru, yakni 40 persen lahan bagi fasilitas umum dan 60 persen bagi rumah-rumah warga.

Tiap keluarga mendapat lahan 100 meter persegi. Pemerintah pusat akan membantu membangun rumah seluas 45 meter persegi dengan anggaran Rp 50 juta per rumah. Jadi, di lahan hibah 2 hektar itu akan dibangun sekitar 150 rumah.

(Bersambung ke hlm 11 kol 3-5)

## Rekonstruksi Pascabencana

(Sambungan dari halaman 1)

Warga lain akan direlokasi ke tempat lain. Lahannya akan dibahas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Relokasi juga akan dilakukan bagi warga Pulau Sebesi dan Sebuku, Lampung Selatan. "Tadi saya tanyakan kepada warga Sebesi, mereka ingin direlokasi agak naik. Sudah tidak berani di bibir pantai. Tetap di pulau itu, tetapi lebih atas," ujar Jokowi.

Untuk warga di Kabupaten Pandeglang dan Serang, Banten, pemerintah pusat menanti lahan relokasi dari pemda setempat. Pemerintah pusat juga akan membangun rumah bagi warga di pesisir barat Banten.

Proses relokasi warga pe-

nyintas bencana ditargetkan selesai paling lambat tiga bulan.

### Ada rekahan

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dalam pertemuan di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, kemarin, memaparkan, ada rekahan di Anak Krakatau dari hasil pemotretan dengan pesawat dan analisis geologi dari citra satelit radar. Hal itu bisa memicu longsor sehingga ada tsunami susulan.

Namun, menurut Sekretaris Badan Geologi Radmono Purbo, retakan pascaerupsi gunung api itu wajar. "Tak ada potensi tsunami akibat Anak Krakatau," katanya.

Perbedaan pandangan itu

membingungkan warga. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggamus, Lampung, Fina Oktasari menuturkan, rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengikuti BMKG.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah pengungsi 36.923 orang per Rabu (2/1/2019). Sementara para nelayan di pesisir Pandeglang terpuruk pascatsunami Selat Sunda lantaran perahu rusak, rumah luluh lantak, dan khawatir ada tsunami susulan. Yayat Supriyatna (30), warga Desa Cigondang, Labuan, misalnya, kehilangan rumah dan kapalnya rusak.

(NTA/AIK/ILO/NIA/PDS/BAY/IGA/SPW/E10/E17/E12)

Judul	Pembangunan Huntara Seret	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 15)		
Resume	Pembangunan dan penempatan hunian sementara untuk penyintas gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah melewati target akhir desember 2018. Kendalanya keterbatasan material bangunan. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengakui seretnya pembangunan dan penempatan Huntara. "Targetnya skhir desember 2018 akan tetapi ada banyak hambatan yang tidak bisa dihindari". Ketua satuan tugas Penanggulangan bencana Sulteng Kementerian PUPR (Arie Setiadi Moerwanto) menyatakan, material bangunan menjadi kendala utama. Produksi material bangunan, terutama baja ringan terbatas di tengah banyaknya kebutuhan. Selain di Sulteng, Huntara juga dibangun di NTB untuk penyintas gempa bumi.		

# Pembangunan Huntara Seret

Pembangunan hunian sementara di Sulawesi Tengah melewati tenggat waktu. Kendalanya, selain ketersediaan material bangunan, juga ketersediaan pekerja yang terampil.

**PALU, KOMPAS** — Pembangunan dan penempatan hunian sementara untuk penyintas gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah melewati target akhir Desember 2018. Kendala utamanya keterbatasan material bangunan.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengakui seretnya pembangunan dan penempatan hunian sementara (huntara). "Targetnya akhir Desember 2018, tiga bulan setelah gempa bumi. Akan tetapi, ada banyak hambatan yang tak bisa dihindari," kata Longki usai meninjau pembangunan huntara di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulteng, Rabu (2/1/2019).

Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto menyatakan, material bangunan menjadi kendala utama. Produksi material bangunan, terutama baja ringan, terbatas di tengah banyaknya kebutuhan. Selain di Sulteng, huntara juga dibangun di Nusa Tenggara Barat untuk penyintas gempa bumi. "Bahkan, karena keterbatasan stok, ada perubahan spesifikasi pada baja ringan," kata Arie yang mendampingi Longki.

Kendala lain, kata Arie, adalah tenaga kerja. Keterampilan para pekerja lokal yang direkrut kurang sehingga sulit mencapai target penyelesaian.

Hingga awal Januari 2019, dari target 669 pembangunan huntara untuk tahap pertama, baru selesai 194 unit yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Dari huntara itu, tak lebih dari lima unit yang telah ditempati.

Huntara dibangun untuk penyintas sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Mereka akan menempati huntara setidaknya selama 2 tahun. Satu



KOMPAS/VIDELIS JEMALI

**Pekerja** memasang sambungan listrik di unit hunian sementara (huntara) di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (2/1/2019). Penyelesaian pembangunan huntara untuk penyintas gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulteng tak selesai sesuai target, yakni pada akhir Desember 2018.

kompleks huntara terdiri atas sejumlah unit yang masing-masing berisi 12 kamar. Satu keluarga menempati satu kamar.

Catatan Pusat Data dan Informasi Bencana Sulteng per 6 Desember 2018 menyebutkan, korban meninggal akibat gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, 28 September, di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong 2.227 orang dan korban hilang 965 orang. Pusat Data juga mencatat rumah hilang 1.784 unit, rumah rusak berat 24.739 unit, rusak sedang 18.892 unit, dan rusak ringan 22.820 unit.

Meski seret, Longki menilai, pembangunan huntara banyak kemajuannya. Di Kelurahan Silae, penyintas menempati huntara sejak dua minggu lalu. Ke depan, penempatan huntara yang rampung dibangun dilakukan setiap dua minggu.

Huntara di Kelurahan Duyu ada 16 unit. Setiap kamar dilengkapi satu jendela dan satu pintu. Lantai dan dinding huntara dari papan lapis. Dua tangki air untuk masing-masing unit huntara sudah tersedia. Namun, petugas masih menyambung kabel listrik ke setiap unit dan bilik.

Huntara yang dibangun di

Kelurahan Petobo, Palu Selatan, banyak yang sudah rampung. Sebagian lainnya dalam tahap penyelesaian, misalnya memasang atap.

## Masih di tenda

Saat ini penyintas tersebar di sejumlah titik pengungsian. Ada penyintas yang menempati huntara yang dibangun lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah provinsi lain. Huntara itu umumnya dari papan dengan lantai beton kasar. Misalnya di Kelurahan Petobo dan Kelurahan Lere, Kota Palu.

Tak sedikit pula penyintas

yang masih menempati tenda darurat beratap dan berdinding terpal serta berlantai papan atau spanduk bekas. Mereka antara lain di pengungsian Kelurahan Duyu di Kota Palu serta Desa Oloboju dan Pombewe di Kabupaten Sigi.

Wilda (32), penyintas di Kelurahan Duyu, menyatakan, tenda darurat sering bocor saat hujan. Tenda-tenda itu dilapisi terpal lagi. "Saat tidak hujan, tenda panas. Padahal, banyak penyintas yang memiliki bayi. Kami berharap segera menempati huntara agar lebih nyaman dan tidak semakin sengsara," ujarnya. (VDL)

Judul	<b>Dampak gempa dan Tsunami Selat Sunda: Manufaktur Aman, Pariwisata Rawan</b>	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 6)		
Resume	MEnjelang akhir 2018, Indonesia kembali dilanda duka akibat bencana tsunami yang menimpa beberapa daerah di Provinsi Banten dan Lampung. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau diyakini menjadi penyebab munculnya tsunami di kawasan Selat Sunda pada 22 Desember lalu.		



**Menjelang akhir 2018, Indonesia kembali dilanda duka akibat bencana tsunami yang menimpa beberapa daerah di Provinsi Banten dan Lampung. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau diyakini menjadi penyebab munculnya tsunami di kawasan Selat Sunda pada 22 Desember 2018.**

Oktaviano Donald Baptista, Hellyan, & Fitri Sartika Dewi redaksi@bisnis.com

**T**sunami Selat Sunda yang melanda 5 kabupaten yaitu Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus, menimbulkan jumlah korban yang sangat besar. Dari helima kabupaten tersebut, Pandeglang merupakan daerah dengan kerusakan yang terparah, dan korban jiwa terbanyak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 33.721 orang mengungsi, 437 korban meninggal dunia, 16 orang masih hilang, dan 14.059 mengalami luka-luka.

Sementara itu, dampak fisik akibat bencana tersebut antara lain adalah kerusakan pada 2.752 unit rumah, 92 penginapan dan toko-toko, 510 perahu dan kapal, serta 147 kendaraan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa data yang dirilis tersebut masih bersifat sementara dan masih ada kemungkinan bertambah. Dia menutarakan, upaya penanganan darurat bencana pada lima kabupaten yang terdampak juga masih diberlakukan.

Untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Banten, pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat diberlakukan selama 14 hari terhitung sejak 27 Desember 2018 hingga 9 Januari 2019. Sementara itu, untuk Kabupaten Lampung Selatan masa tanggap darurat diberlakukan sejak 30 Desember 2018 hingga 5 Januari 2019. Sutopo menutarakan, pemberlakuan masa tanggap darurat dibutuhkan untuk mempermudah akses bagi pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana. Kemudahan akses yang dimaksud ialah dalam hal pengerahan aparat

gabungan, dan pemberian bantuan logistik serta keuangan baik dari APBN maupun APBD, serta dukungan manajerial dan terbit administrasi.

"Hingga saat ini, BNPB bersama aparat gabungan terkait seperti TNI, Polri, dan NGO masih terus berupaya melakukan penanganan darurat pada lima kabupaten yang terdampak," ujarnya dalam konferensi pers, baru-baru ini.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hingga saat ini aktivitas erupsi Gunung Krakatau masih terus terjadi. Dari hasil pantauan yang dilakukan, terlihat adanya retakan baru pada Gunung Anak Krakatau.

Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhammad Sadly menyampaikan dari pemantauan udara yang terakhir dilakukan tim gabungan dari BMKG, TNI AU, Badan Geologi Kementerian ESDM, serta Menko Maritim memang meremehkan adanya retakan baru di Gunung Anak Krakatau.

Secara garis besar, situasi Gunung Anak Krakatau cenderung membaik seiring dengan berkurangnya aktivitas erupsi. Oleh karena itu, zona kewaspadaan sudah dikurangi menjadi 500 meter dari titik pantai di Lampung dan Banten, dari jarak sebelumnya yang mencapai 1 kilometer.

Menurutnya, Badan Geologi sendiri masih menetapkan status siaga untuk Gunung Anak Krakatau, dan bakal memperbarui status terbaru berdasarkan pantauan yang terus dilakukan.

**AKTIVITAS BISNIS**  
Kondisi Gunung Anak Krakatau

yang berstatus siaga atau pada level III masih menjadi momok bahwa bencana dahsyat bisa kembali datang sewaktu-waktu. Di tengah ketidakpastian dari kondisi Gunung Anak Krakatau, pelaku usaha menastikan bahwa aktivitas bisnis tetap berjalan normal.

Presiden Direktur Chandra Asri Erwin Ciputra mengatakan, tsunami Selat Sunda hanya berdampak minor pada beberapa fasilitas pabrik. Produser petrokimia terbesar di Indonesia ini memiliki dua fasilitas pabrik yang masing-masing terletak di Cilandang, Cilegon, dan Puloampel, Serang.

Vice President Corporate Relations PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Suhat Miyasa menyatakan bahwa saat ini kegiatan produksi di pabrik Chandra Asri tetap berjalan seperti biasa.

Meskipun demikian, dia menyatakan bahwa aspek keselamatan seluruh pegawainya tetap menjadi hal terpenting. Oleh karena itu, berbagai skenario untuk antisipasi jika terjadi bencana pun telah dipersiapkan.

Langkah antisipasi yang dilakukan antara lain adalah Chandra Asri turut melakukan pantauan dengan memonitor kondisi laut dan Gunung Anak Krakatau selama 24 jam penuh melalui monitor muka air laut dan informasi dari BMKG.

Selain itu, pihaknya juga selalu memastikan kesiapsiagaan dari kondisi pabrik, dan karyawannya dari risiko bencana. "Apabila terjadi emergency, pabrik dapat dimatikan hanya dalam waktu 3 menit dengan aman," ujarnya kepada *Bisnis*.

Walaupun sejumlah fasilitas perusahaan berada di kawasan rawan bencana, Suhat menyatakan bahwa perusahaan tidak membutuhkan insentif khusus dari pemerintah untuk penanganan bencana.

Menurutnya, pihaknya lebih berharap agar pemerintah dan lembaga yang berwenang bisa lebih responsif dalam menyampaikan peringatan dini mengenai potensi bencana.

Sekali tiga yang dengan Chandra Asri, kegiatan produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. juga tetap berlangsung seperti biasanya. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyatakan tsunami Selat Sunda tak berdampak pada kegiatan produksi, karena pabrik terletak di kawasan yang cukup terlindungi.

"Lokasi kawasan industri KS terlindungi, karena tidak tegak lurus dari anak Krakatau," ujarnya. Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel

Suriadi Arief menyatakan, pihaknya selaku pengelola kawasan industri Cilegon telah memastikan kesiapan dan langkah tanggap darurat jika terjadi keadaan bahaya.

Dia menutarakan, pihaknya telah membentuk tim reaksi cepat yang terdiri dari para *tenant* di kawasan industri Cilegon yang dipimpin oleh anak usaha Krakatau Steel yaitu PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (NIEC).

Selain itu, pihaknya juga secara aktif menggelar kegiatan tsunami *drill*, dan secara rutin melakukan evaluasi terhadap mitigasi bencana yang telah direncanakan.

Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi tersebut tidak berdampak signifikan pada kawasan industri. Pasalnya, sejumlah kawasan industri yang ada Banten dinilai berjarak cukup jauh dari lokasi terdampak bencana.

"Pada prinsipnya tidak berpengaruh banyak karena lokasi bencana dengan kawasan industri berjauhan," jelasnya kepada *Bisnis*.

Peristiwa lalu itu dan potensi bencana yang masih ada di wilayah itu pun diyakini tidak bakal berpengaruh signifikan pada rencana pengembangan kawasan industri baru, khususnya di Pandeglang. Menurutnya, sejauh ini rencana pembangunan kawasan industri baru tersebut masih sesuai dengan rencana.

Pandeglang digadang-gadang sebagai kawasan industri baru untuk bersaing dengan kawasan industri lainnya melalui Rencana Zonasi Perda No.3/2018.

Beleid ini berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang 2011—2013, yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang pada akhir Juli lalu.

"[Soal Pandeglang] tidak ada dampak. Semua pembangunan berjalan sesuai perencanaan. [Pandeglang] masih bisa tetap menjadi kawasan industri," ungkapnya.

**PARIWISATA**

Meski dampak tsunami pada sektor industri tak terlalu besar, bencana tersebut cukup memukul sektor pariwisata. Beberapa resort, dan hotel yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung pun mengalami kerusakan cukup parah.

Sejak ditetapkan sebagai KEK pada 2016, kawasan Tanjung Lesung memang terus mempercantik diri dalam

menarik sebanyak-banyaknya investor dan kunjungan wisatawan.

Akan tetapi, tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kawasan yang dikelola dan dikembangkan Jababeka Group melalui anak usahanya PT Banten West Java Tourism Development Corporation (BWJ) itu sempat terhempis.

Tak ingin terpuh terlalu lama, Chairman Jababeka Group Setyono Djundi Darmono pun menyatakan bahwa resort yang dikelolanya sudah kembali beroperasi sejak 1 Januari 2019.

Hal itu dilakukan karena banyaknya permintaan dari para turis dari segmen yang berbeda, seperti yang ingin bersantai melihat bencana alam, ingin melakukan riset studi, dan para relawan.

KEK Tanjung Lesung terdiri di atas lahan seluas 1.500 hektare (ha). Dari keseluruhan lahan tersebut, sekitar 8 ha atau 0,5% di antaranya terkena dampak dari tsunami. Hal itu dikarenakan lokasinya yang tepat berhadapan dengan pantai dan gunung Krakatau.

Darmono mengungkapkan, pihaknya pun akan segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang rusak. Selaku pengelola KEK Tanjung Lesung, pihaknya pun berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur berupa tanggul laut untuk memecah ombak.

Tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan bisa segera mengadatkan alat pendeteksi dini tsunami. Dengan adanya infrastruktur, dan perlengkapan yang memadai, jumlah korban dapat diminimalisir.

Darmono mengatakan, saat ini juga ada beberapa investor yang *wait and see* untuk menanti kejelasan pengembangan KEK pascabencana. Dia memastikan bahwa pengembangan kawasan tersebut akan tetap berlangsung mengingat investasi yang digelontorkan sudah cukup besar.

Selain itu, dia menutarakan investor juga masih menanti keseriusan pemerintah dalam penanganan bencana di kawasan pariwisata. Berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, KEK Tanjung Lesung diperkirakan bisa menarik investasi hingga Rp92,4 triliun sampai dengan 2025.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menyatakan, target investasi Rp92,4 triliun bakal sulit dicapai. Menurutnya, KEK Tanjung Lesung yang terletak di kawasan rawan bencana membuat investor cenderung ragu untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

Selain itu, dia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan dan mempromosikan KEK Tanjung Lesung pun dinilai masih kurang optimal. Hal itu menyebabkan target investasi di kawasan tersebut bakal sulit terpenuhi.

"Tanjung Lesung kini sudah lahan ditetapkan sebagai KEK, tetapi sampai saat ini tidak terlalu berkembang," ujarnya.

Untuk menarik minat investor, imbuhnya, pemerintah dituntut untuk lebih serius dalam menyediakan sarana dan prasarana di kawasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi risiko bencana.

Selain itu, penambahan akses transportasi menuju kawasan tersebut juga dinilai penting jika ingin mendatangkan lebih banyak wisatawan. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan rute penyeberangan dari Jakarta ke Tanjung Lesung, serta pembangunan bandara. □

### Bencana Tsunami Selat Sunda, Siapa Menduga?

Bencana Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 22 Desember 2018 sangat mengejutkan. Tak ada yang menduga bahwa air bah yang menjorok ke darat pada malam itu mendatangkan musibah. Ombak besar bertubi-tubi datang mengulangi daratan serta bangunan di atasnya. Ribuan orang meninggal sia-sia dan kerugian harta benda tidak terhitung. Dampak bencana yang dahsyat baru diketahui belakangan, hingga banyak pihak khawatir hal itu dapat melumpuhkan sendi-sendi perekonomian daerah. Indonesia dinilai sejumlah pihak lalai dalam memitigasi kejadian sebelum bencana tsunami terjadi. Bagaimana seharusnya negeri ini memetik pelajaran berharga dari peristiwa tersebut?

### Kawasan Industri & KEK di Banten dan Lampung

**Serang-Banten**

- Kawasan Industri Terpadu MGM
- Modern Cikande Industrial Estate
- Kawasan Industri Terpadu Wilmar

**Cilegon-Banten**

- Jababeka Industrial Estate
- Krakatau Industrial Estate Cilegon

**Tangerang-Banten**

- Kawasan Industri & Perumahan Cikupamas
- Millennium Industrial Estate
- Taman Tekno Bumi Serpong Damai

**Lampung**

- Kawasan Industri Maritim Tanggamus

### Profil KEK Tanjung Lesung

Peresmian: Februari 2015  
Lokasi: Pandeglang, Banten  
Luas: 1.500 Ha  
Badan usaha pengelola: PT Banten West Java Tourism Development Corporation  
Landasan hukum: PP No.26/2012  
Kegiatan utama: pariwisata & ekonomi kreatif  
Nilai investasi: pembangunan kawasan Rp1,7 triliun, dan diperkirakan menarik investasi hingga Rp92,4 triliun hingga 2025

### Dampak Tsunami Selat Sunda

- 437 meninggal dunia
- 14.059 orang luka-luka
- 16 orang hilang
- 33.719 orang mengungsi
- 2.752 rumah rusak
- 92 penginapan dan toko rusak
- 510 kapal dan perahu rusak
- 147 kendaraan rusak

### Profil Gunung Anak Krakatau

Ketinggian: 338 meter dari muka laut  
Aktivitas Erupsi: 1927  
Kemunculan: 1883

Judul	<b>Pembangunan Akses ke Destinasi Dikebut</b>	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Sejumlah proyek percepatan pembangunan akses kawasan wisata di sebagian daerah telah rampung, dan sebagian lainnya menjadi program prioritas tahun ini. Di antaranya pembangunan jalan 41,08 km dari Kota Padang ke KSPN Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan Sumbar telah rampung. Bahkan ada pula 40 proyek strategis yang focus pada bidang pariwisata dan infrastruktur di Jawa Barat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kehadiran jalan di Sumbar tersebut bakal mempermudah akses wisatawan untuk mendatangi kawasan Mandeh karena waktu tempuh ke lokasi menjadi lebih singkat. Akses jalan yang baik akan menunjang perekonomian masyarakat di Mandeh, yang terkenal dengan pulau-pulaunya yang eksotis dan wisata baharinya.		

# Pembangunan Akses ke Destinasi Dikebut

**PADANG** — Sejumlah proyek percepatan pembangunan akses ke kawasan wisata di sebagian daerah telah rampung, dan sebagian lainnya menjadi salah satu program prioritas pada tahun ini.

redaksi@bisnis.com

Di antaranya pembangunan jalan 41,08 km dari Kota Padang ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatra Barat yang telah rampung.

Bahkan, ada pula 40 proyek strategis yang fokus pada bidang pariwisata dan infrastruktur di Jawa Barat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kehadiran jalan di Sumatra Barat tersebut bakal mempermudah akses wisatawan untuk mendatangi kawasan Mandeh karena waktu tempuh ke lokasi akan menjadi lebih singkat.

"Akses jalan yang baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata Mandeh yang terkenal dengan pulau-pulaunya yang eksotis dan wisata baharinya," kata Basuki melalui penjelasan resmi yang diterima *Bisnis*, Rabu (2/1).

Dia mengatakan bahwa dengan terbangunnya akses jalan tersebut maka tercipta akselerasi pengembangan destinasi wisata Mandeh sebagai destinasi baru yang menjadi unggulan pariwisata di Sumbar.

Terlebih lagi, jalan dengan suhupan pemandangan indah yang menghadap Samudera Hindia itu juga akan menyertai perjalanan para wisatawan karena sebagian besar ruas jalan berada di tepi laut.

Sebelumnya, untuk menuju kawasan wisata Mandeh, wisatawan harus melewati jalan lintas Padang-Painan yang memakan waktu hingga 1,5 jam perjalanan. Dengan jalan baru tersebut, waktu tempuh bagi wisatawan hanya 45 menit.

Basuki mengungkapkan, pembangunan jalan akses wisata Mandeh merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian PUPR untuk pengembangan destinasi wisata baru seperti Kawasan Mandeh guna mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing pada 2019.

Pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai

► **Akses jalan yang baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata.**

► **Kawasan Mandeh, Sumatra Barat diharapkan dapat menjadi salah satu penopang target kunjungan wisman pada 2019.**

Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang, Ditjen Bina Marga.

Dalam kurun waktu 2015—2017, proyek itu telah berhasil menyelesaikan sepanjang 16 km dengan lebar 6 meter dan menghabiskan anggaran total Rp88,26 miliar.

Sementara itu, sisanya jalan sepanjang 25,08 km diselesaikan pada 2018 dengan tiga kontrak.

Kontrak pertama ditandatangani 2 Mei 2018, yakni Paket Pekerjaan Jalan Akses Wisata Mandeh sepanjang 13,03 km dengan nilai kontrak Rp55,18 miliar oleh kontraktor PT Statika Mitrasarana dengan masa pelaksanaan 240 hari.

Kontrak kedua yakni Paket Pembangunan Jalan Akses Wisata Mandeh (lanjutan) sepanjang 12,05 km dengan nilai Rp59,9 miliar. Pekerjaan dilakukan oleh kontraktor PT Lubuk Minturum Konstruksi Persada dengan masa pelaksanaan 240 hari.

Adapun kontrak ketiga yakni Paket Pekerjaan Penggantian, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Jalan Akses Wisata Mandeh untuk 12 jembatan dengan total panjang 245 meter senilai Rp12,7 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT Pilar Prima Mandiri dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender.

## AGENDA JABAR

Di Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan akan menggenjot sekitar 40 program unggulan senilai Rp1,5 triliun mulai awal 2019 ini didukung dengan perubahan di level organisasi perangkat

daerah (OPD) dan BUMD.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan bahwa untuk program pembangunan di Jabar pada 2019 akan mencakup 40 proyek strategis yang difokuskan pada bidang pariwisata dan infrastruktur.

Selain itu, pihaknya juga mengklaim semua dimensi masyarakat juga disentuh seperti pendidikan karakter, desa mandiri, kesehatan termasuk keagamaan.

"Nanti pada Desember 2019 semua perubahan yang dijanjikan selama kampanye *InsyaAllah* bermuara pada hasil yang maksimal mulai dari jalan mulus, pariwisata, pendidikan karakter, desa mandiri dan semua dimensi kita sentuh termasuk keagamaan. Inilah wajah Jabar yang harus kami jaga sebagai provinsi paling inovatif di Indonesia," tuturnya.

Dia mencatat 40 proyek strategis yang akan dipacu pada awal 2019 antara lain, revitalisasi Kalimalang Bekasi, Waduk Darma Kuningan, Pantai Pangandaran, Situ Bagendit Garut, Situ Ciburuy Bandung Barat, Alun-alun Cirebon, Alun-alun Sumedang, Alun-alun Tasikmalaya, Alun-alun Sukabumi, Gunung Padang dan lainnya. "Estimasi anggarannya mencapai Rp1,5 triliun," ujarnya.

Menurutnya, program yang dikejar mulai Januari 2019 adalah menggelar 40 program secara awal. Di satu sisi, pihaknya juga akan mulai merintis penerapan transparansi anggaran via *e-budgeting*.

"Januari 2019, kita akan mengevaluasi anggaran 2020 dengan *e-budgeting* sehingga uang triliunan milik Pemprov ini harus terasa betul manfaatnya pada masyarakat Jabar dengan pendekatan teknologi," ungkapnya.

Di Malang, Pemerintah Kota Malang menargetkan proyek Jembatan Kedungkandang akan dibangun paling lambat pada 2020 agar dapat mendukung pengoperasian jalan tol Pandaan—Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa permasalahan terkait hukum pada proyek Jembatan Kedungkandang yang mangkrak telah selesai, sehingga proyek tersebut bisa ditender ulang dan dikerjakan paling lambat 2020.

"Biayanya masih belum diketahui. Untuk mengetahui biaya proyek jembatan Kedungkandang, maka harus mengacu detailed engineered design [DED]-nya," ujarnya saat dihubungi *Bisnis* di Malang, Selasa (1/1). (K24/K57/Heri Falsao)

Judul	Jababeka Ingin Bangun Tanggul Laut	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 20)		
Resume	PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. mengajak pemerintah untuk membangun tanggul dan pemecah ombak di KEK Tanjung Lesung Banten setelah terjadi tsunami di kawasan itu 22 Desember 2018 lalu. Chairman Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono mengatakan bahwa ajakan tersebut telah disampaikan kepada Menko Perekonomian. Saya sudah sampaikan ke Menko (perekonomian) Darmin Nasution, beliau sudah menyambut dengan baik. "Saya kira akan menunggu perencanaan dari pemerintah." Selain pembangunan tanggul, Darmono menambahkan bahwa perlu juga dibangun shelter untuk tempat perlindungan serta peringatan dini agar orang bisa bersiap ketika terjadi bencana.		

► KEK TANJUNG LESUNG

# Jababeka Ingin Bangun Tanggul Laut

JAKARTA — PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. mengajak pemerintah untuk membangun tanggul dan pemecah ombak di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Banten, setelah terjadinya tsunami Selat Sunda yang melanda kawasan itu pada 22 Desember 2018.

Mutiara Nabila  
redaksi@bisnis.com

Chairman Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono mengatakan bahwa ajakan untuk membangun infrastruktur tersebut sudah disampaikan kepada Menko Perekonomian.

"Saya sudah sampaikan ke Menko [Perekonomian] Darmin Nasution, beliau sudah menyambut dengan baik. Saya kira akan menunggu perencanaan dari pemerintah," ujarnya sesuai acara Doa Bersama Lintas Agama untuk Musibah di Selat Sunda dan Pesisir Banten, Rabu (2/1).

Selain pembangunan tanggul, Darmono menambahkan bahwa perlu juga dibangun shelter untuk tempat perlindungan serta peringatan dini agar orang bisa bersiap jika terjadi bencana.

"Jika berhasil dibangun, bisa jadi contoh oleh pembangunan wisata lain dan bisa dibentuk tempat pelatihan penanggulangan bencana," tuturnya.

Selain mengajak pemerintah membangun infrastruktur untuk mitigasi dampak bencana, Jababeka juga menawarkan untuk bekerja sama dengan pemerintah membantu merelokasi korban bencana tsunami Selat Sunda dengan menyediakan lahan di Tanjung Lesung dan membangun rumah susun untuk menjadi rumah tinggal.

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung memiliki luas 1.500 hektare. Keberadaannya dinilai dapat menjadi

► **Dewan Nasional KEK fokus menyiapkan mitigasi bencana melalui standarisasi pembangunan KEK.**

► **Jababeka akan bekerja sama dengan pemerintah membantu merelokasi korban bencana tsunami Selat Sunda.**

pemicu pembangunan pariwisata di wilayah Banten.

Dari peristiwa tsunami tersebut, sekitar 8 hektare atau 0,50% dari keseluruhan lahan terkena dampak tsunami. Sementara itu, bangunan di kawasan Tanjung Lesung yang mengalami kerusakan sekitar 30%.

Darmono mengungkapkan bahwa tsunami Selat Sunda yang melanda Kabupaten Pandeglang pada Sabtu (22/12) malam membawa kerugian besar bagi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Nilainya diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Ketika diminta tanggapannya terkait dengan usulan Jababeka, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto mengatakan bahwa usulan tersebut cukup baik. Namun, untuk merealisasikannya masih diperlukan evaluasi dan perlu dicarikan sumber pembiayaannya.

"Kalau terkait KEK, sekarang kami sedang fokus menyiapkan mitigasi bencana melalui standarisasi pembangunan KEK supaya bisa digunakan oleh KEK lainnya," kata Enoh kepada *Bisnis* melalui layanan Whatsapp, Rabu (2/1).

Adapun, lanjutnya, pembahasannya secara terperinci baru akan dilaksanakan pada pekan depan.

Menurut Enoh, pembuatan standar mitigasi itu membutuhkan waktu dan melibatkan berbagai pihak seperti para pakar, akademisi, praktisi serta kementerian terkait.

#### TETAP DIMINATI

Pada bagian lain, Darmono optimistis investasi di KEK Tanjung Lesung makin gencar pascatsunami karena banyak investor yang berminat untuk segera membangun kembali kawasan pariwisata tersebut.

Dengan adanya bencana tersebut, katanya, jelas menimbulkan pertanyaan di kalangan investor terkait dengan tindakan yang akan diambil pemerintah untuk melakukan perbaikan dan mengatasi kondisi tersebut.

## Tanjung Lesung, KEK Pariwisata Pertama

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung merupakan KEK pariwisata pertama dan telah diresmikan beroperasi pada Februari 2015. Pada 22 Desember 2018 malam, KEK tersebut menjadi salah satu kawasan yang terdampak tsunami Selat Sunda. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur lainnya sebagai sarana memitigasi bencana seperti pembangunan tanggul dan pemecah ombak.

### Profil KEK Tanjung Lesung

Luas lahan: 1.500 hektare  
Lahan terdampak tsunami: 8 hektare  
Nilai investasi pembangunan kawasan: Rp1,70 triliun  
Proyeksi 2025: menarik investasi hingga Rp92,40 triliun  
Target kunjungan wisatawan 2020: 6,0 juta (jika beroperasi normal)  
Proyeksi tenaga kerja: 85.000 orang

Sumber: *keks.go.id*

Bisnis.com/Wiki



"Saya bilang betul, pemerintah sudah mulai melakukan perbaikan sehingga mereka [investor] semakin yakin. Investasi di Selat Sunda ini akan semakin baik karena dengan adanya bencana karena kita semua ingin bergerak untuk memperbaiki infrastruktur."

Darmono menyebutkan bahwa investor dari Jepang, China, Taiwan, Korea Selatan,

Australia, dan kawasan Timur Tengah banyak yang berdatangan karena kondisi Indonesia makin menarik. Apalagi, jumlah wisatawan dari domestik maupun asing makin meningkat.

"Jadi, sebetulnya pariwisata memang ujung tombak pembangunan kita, yang nanti dampaknya banyak sekali pada industri manufaktur. Dengan ada ma-

salah ini, kita semua jadi lebih siap," tambahnya.

Selanjutnya, sebagai upaya memitigasi bencana, Darmono menjelaskan bahwa Jababeka akan mengevaluasi tata ruang bangunan di KEK Tanjung Lesung membangun shelter, dan membuat hotel dengan kamar berkonsep kontainer.

"Kemudian, kami juga akan melakukan training pada karyawan-karyawan hotel kami bagaimana kalau tamu datang itu harus diajari dulu standar operasional prosedurnya kalau ada bencana. Semoga ini bisa jalan terus tidak cuma rajin dan disiplin sebentar, tetapi kemudian 3—4 tahun lagi sudah lupa lagi," lanjut Darmono.

Terkait dengan evaluasi tata ruang, sejumlah bangunan semipermanen di Tanjung Lesung sempat dianggap menyalahi Undang-Undang Tata Ruang karena jaraknya yang hanya beberapa meter dari bibir pantai. Namun, menurut Darmono, bangunan hotel dan vila di kawasan tersebut sudah sesuai dengan aturan dengan jarak 100 meter dari garis sepadan pantai ketika dibangun.

"Karena terjadi erosi dan abrasi, jadi jaraknya mendekat. Maka itu, harus dibangun tanggul. Bangunan semi permanen, seperti kios-kios itu kan harus dekat dengan pantai, tidak bisa jauh-jauh. Bisa, tapi ya, harus siap jalan," paparnya. ■

## Tol Serang—Panimbang Tak Terdampak Tsunami

JAKARTA — PT Wijaya Karya Tbk. memastikan bahwa tsunami Selat Sunda yang melanda Banten dan Lampung pada Sabtu, 22 Desember 2018 malam tidak berdampak pada proyek jalan tol Serang—Panimbang yang sedang dibangunnya.

Direktur Operasi 1 PT Wijaya Karya Tbk. (WIKO) Agung Budi Waskito mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi tersebut berada jauh dari lokasi pembangunan proyek.

"Jalan tol [Serang—Panimbang] sama sekali tidak terkena dampak tsunami karena yang sedang kami kerjakan dari arah Serang, berjarak 60 kilometer

dari pantai," ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa perseroan fokus melakukan percepatan konstruksi untuk seksi 1 (Serang—Rangkasbitung) sepanjang 26,50 km dan mempercepat pembebasan lahan seksi 3 (Bojong—Panimbang) sepanjang 24,40 km untuk mengejar target penyelesaian proyek pada akhir 2019.

Berdasarkan data pantauan Badan Pengatur Jalan Tol, progres pembebasan lahan seksi 1 sudah 95,06%, seksi 2 mencapai 93,72%, dan seksi 3 tercatat 47,41%.

Adapun, progres konstruksi pada

seksi yang dikerjakan badan usaha jalan tol saat ini mencapai 10,10% di segmen 1 dan 0% di segmen 3.

Konsesi proyek jalan tol senilai Rp5,33 triliun tersebut dimiliki oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

WIKO menjadi pemegang saham terbesar pada pengusahaan tol ini dengan menguasai 80% saham, PT Pembangunan Perumahan Tbk. (PTPP) 15%, dan PT Jababeka Infrastruktur 5%.

Pengerjaan proyek tersebut dilakukan dengan skema *contractor pre-financing*, yang dikerjakan oleh investor yang juga merupakan kontraktor, yakni WIKO dan PTPP. *Oktafa R. Nugroho*

Judul	<b>Proyek Bendungan: Kontrak Rp. 7,18 Triliun Ditandatangani Desember 2018</b>	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 20)		
Resume	Menjelang pergantian tahun, Kementerian PUPR menandatangani Sembilan paket kontrak pembangunan lima bendungan senilai Rp. 7, 18 triliun dengan sejumlah BUMN. Berdasarkan data lelang pengadaan secara elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, lelang 9 paket tersebut dimenangkan oleh BUMN. Sembilan paket kontrak tersebut terdiri atas: Bendungan Menikin (2 paket), Bendungan Bagong (2 paket), Bendungan Rukoh (2 paket), Bendungan Meninting (2 paket), dan Bendungan Tamblang (1 paket).		

► PROYEK BENDUNGAN

## Kontrak Rp7,18 Triliun Ditandatangani Des. 2018

JAKARTA — Menjelang pergantian tahun, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat menandatangani sembilan paket kontrak pembangunan lima bendungan senilai Rp7,18 triliun dengan sejumlah badan usaha milik negara.

Berdasarkan data Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, lelang sembilan paket kontrak tersebut dimenangkan oleh kontraktor BUMN.

Sembilan paket kontrak tersebut terdiri atas Bendungan Manikin (2 paket), Bendungan Bagong (2 paket), Bendungan Rukoh (2 paket), Bendungan Meninting (2 paket), dan Bendungan Tamblang (1 paket).

PT Wijaya Karya Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya masing-masing memenangi satu paket lelang dengan nilai penawaran berkisar Rp875,24 miliar—Rp1,12 triliun.

Sementara itu, PT PP Tbk. dan PT Nindya Karya berhasil memenangi dua paket lelang dengan kisaran kontrak Rp377,25 miliar—Rp905,25 miliar.

"Penandatanganan kontrak [untuk lima bendungan] sudah dilakukan," ujar Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih kepada *Bisnis*, Rabu (2/1).

Dia mengatakan bahwa pihaknya memang menargetkan penandatanganan kontrak sejumlah bendungan di-

lakukan pada akhir Desember 2018 setelah pemenang proyek diumumkan sebulan sebelumnya.

Data LPSE menunjukkan bahwa penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Rukoh dan Bendungan Meninting dilaksanakan pada 31 Desember 2018.

Tiga hari sebelumnya, penandatanganan kontrak dilakukan untuk proyek Bendungan Manikin dan Tamblang, sedangkan pada 27 Desember 2018 Bendungan Bagong.

Berdasarkan data LPSE yang dihimpun *Bisnis*, sepanjang 2018, Kementerian PUPR telah menandatangani kontrak 26 paket pembangunan 14 bendungan senilai Rp22,19 triliun.

Kontrak tersebut dimenangkan oleh enam BUMN karya dengan nilai kontrak paling banyak diraih oleh PT Brantas Abipraya senilai Rp5,09 triliun, disusul PT Wijaya Karya Tbk. (Rp4,28 triliun), PT Waskita Karya Tbk. (Rp4,05 triliun), PT Nindya Karya (Rp3,49 triliun), PT PP Tbk. (Rp3,31 triliun), dan PT Hutama Karya (Rp1,95 triliun).

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi sebelumnya menjelaskan bahwa hingga 2018, kementerian telah merampungkan 17 proyek bendungan yang terdiri atas 8 bendungan baru dan 9 lanjutan.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan selama 2015—2019. (*Rivki Maulana*)

Judul	<b>Struktur Organisasi PUPR: Pembiayaan Hunian Harus Difokuskan</b>	Tanggal	Kamis, 3 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 20)		
Resume	Asosiasi Bidang Perumahan menilai keputusan pemerintah mengubah struktur organisasi Kementerian PUPR melalui Perpres No. 135 Tahun 2018 tentang Kementerian PUPR perlu dipertimbangkan. Salah satu poin dalam perpres tersebut yaitu Ditjen Pembiayaan Perumahan diubah menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Perubahan struktur tersebut dikhawatirkan bisa menjadi beban yang terlalu berat bagi ditjen yang baru terbentuk. Ketua Umum DPP Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan bahwa seharusnya perumahan lebih diprioritaskan dan difokuskan. Dia juga mengatakan bahwa masalah perumahan bukanlah hal yang sederhana, melainkan terkait dengan banyak hal seperti sosial, pertanahan, dan perizinan.		

### ► STRUKTUR ORGANISASI PUPR

## Pembiayaan Hunian Harus Difokuskan

JAKARTA — Asosiasi bidang perumahan menilai keputusan pemerintah mengubah struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Kementerian PUPR perlu dipertimbangkan.

Salah satu poin dalam perpres tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan diubah menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Perubahan tersebut dilakukan atas pertimbangan untuk mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan.

Perubahan struktur tersebut dikhawatirkan bisa menjadi beban yang terlalu berat bagi ditjen yang baru terbentuk.

Sekjen DPP Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lucida

mengatakan bahwa keputusan perubahan struktur Ditjen Pembiayaan Perumahan cukup mengagetkan.

"Dari unsur pembiayaan perumahan, kami konsentrasinya pada permasalahan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah [MBR], subsidi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, sementara infrastruktur kan yang paling digiatkan oleh pemerintah, pembiayaannya tinggi sekali," kata Totok kepada *Bisnis*, Rabu (2/1).

Ketika diminta komentarnya, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A. Hamid mengatakan bahwa program-program pembiayaan perumahan akan tetap sama kapasitasnya di bawah Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Perpres tersebut mulai efektif berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 21 Desember 2018. Namun, masih ada masa transisi yang ditetapkan dengan

Permen PUPR yang masih dalam proses.

#### LANGKAH MENURUN

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai langkah yang diambil pemerintah untuk menjadikan satu Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memperlihatkan langkah yang menurun.

"Menurut saya, langkah itu terlalu cepat. Seharusnya perumahan lebih difokuskan, bukan dijadikan sub karena visi dan misi infrastruktur dan perumahan berbeda. Ketika perumahan diurus oleh menteri saja tidak mencapai target, memang tercapai satu juta rumah, tapi rumah subsidi tidak," kata Junaidi kepada *Bisnis*.

Dia mengatakan bahwa masalah perumahan bukanlah hal yang sederhana, melainkan terkait dengan banyak hal, seperti sosial, pertanahan, dan

perizinan.

Oleh karena itu, penggabungan ditjen di Kementerian PUPR itu dikhawatirkan akan menimbulkan banyak masalah baru. Menurutnya, pembiayaan perumahan harus ada badan tersendiri agar fokus, tetapi tetap terintegrasi dengan instansi terkait.

"Bagaimana jika nanti di Kementerian PUPR ada perubahan anggaran, pasti yang paling gampang jadi korban adalah perumahan. Namun, kami lihat dulu, apakah di lapangan nanti akan terjadi masalah atau tidak. Jika penggabungan manfaatnya lebih baik, akan kami dorong. Jika menyulitkan, akan kami suarakan!"

Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengharapkan dengan adanya perubahan baru, jangan sampai perumahan dinomorduakan melihat defisit perumahan masih besar, khususnya bagi MBR. "Mudah-mudahan pemerintah tidak mengecilkan bidang perumahan." (*Maria Elena*)